

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat vital bagi sebuah Negara. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan formal yang diharapkan dapat mewujudkan peran pendidikan tersebut. Pendidikan di sekolah yang menyatukan pengembangan ranah pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai yang diharapkan dapat mengembangkan kepribadian dan perwujudan diri peserta didik. Hal ini disebabkan sekolah memiliki program terarah dan terencana, serta memiliki komponen-komponen pendidikan yang saling berinteraksi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri.

Pencapaian tujuan pendidikan tentunya oleh banyak faktor, baik faktor internal (dalam diri), maupun faktor eksternal (dari luar diri). Faktor eksternal antara lain adalah fasilitas belajar mengajar, situasi belajar serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor internal antara lain adalah motivasi, sikap, dan kesadaran. Kesadaran diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Dengan adanya stimulus tersebut diharapkan peserta didik dapat memiliki keinginan untuk dapat menerima ilmu dari proses pembelajaran dan

memahami pengetahuan dari proses belajar itu sendiri.

Bukan hanya memahami pengetahuan saja, namun dari proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memiliki nilai-nilai dari ilmu yang mereka peroleh di sekolah untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan pendidikan untuk dapat membentuk warga negara yang berkarakter. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan membentuk warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan serta nilai-nilai kewarganegaraan.

Nilai-nilai tersebut antara lain, seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan. Dengan begitu warga negara akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan dan berkepribadian. Hal tersebut juga ditegaskan dalam misi dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, dan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa hal yang perlu dicapai tersebut lebih dalam termuat dalam materi PPKn SMA, yaitu mengenai Hak Asasi Manusia. Materi ini sangat penting dalam negara sistem demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia. Penanaman kesadaran tentang hak asasi manusia kepada siswa merupakan bagian dari tujuan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Proses pembelajaran dan penilaian dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada umumnya lebih menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan materi atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitif saja. Hakikatnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya berlangsung dalam pembelajaran di dalam kelas, melainkan pula melalui pendidikan secara lebih luas. Diharapkan dengan mempelajari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan siswa menjadi berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan dan dapat bertanggung jawab dalam tindakannya sehingga diharapkan tidak terjadi salah mengartikan kata demokrasi yang seharusnya tetap pada kaidah-kaidah hukum, norma yang ada untuk menghargai dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diharapkan dapat diaplikasikan oleh peserta didik dimanapun dan kapan pun tempat peserta berada.

Pengaplikasian nilai-nilai tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Mengingat bahwa untuk dapat mencapai tujuan materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang lebih kepada ranah afektif (sikap) bukan suatu hal yang mudah. Hal tersebut dikarenakan untuk membentuk sikap peserta didik tentu dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat seperti hanya 1 atau 2 jam pelajaran PPKn.

Keadaan tersebut menjadi bukti bahwa tugas yang diemban oleh pendidik sangat sulit, khususnya pada guru yang mengajarkan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan yang mengharapakan peserta nantinya dapat menemukan nilai dan membentuk sikap menjadi tantangan tersendiri bagi guru PPKn. Dengan alokasi waktu yang minim, sarana yang memadai, serta kurangnya pemahaman dan kreatifitas guru dalam penyampaian materi PPKn menyebabkan nilai-nilai yang terkandung dalam materi PPKn tidak dapat diaplikasikan oleh peserta didik. Terutama materi mengenai HAM, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai penghargaan terhadap HAM menjadi salah satu masalah dan bukti bahwa materi PPKn sangat erat kaitannya dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah tersebut terjadi di SMA Negeri 1 Bandar Sribawono, berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang siswa kelas XI di SMA Negeri I Bandar Sribawono menyatakan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di sekolahnya berkaitan pada materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan atau sebagai peserta didik yang baik yaitu; dalam berorganisasi terutama OSIS ada saat diadakan diskusi kadang beberapa siswa melarang temannya untuk menyampaikan pendapat atau ide dan ada juga yang melarang teman-temannya yang lain bertanya apabila ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan (egois), hal ini tentunya berkaitan erat dengan ketidakpahaman terhadap hak asasi dalam memberikan pendapat, selain itu masalah yang sering terjadi adalah kadang siswa-siswa putra suka iseng mengganggu siswa putri atau berperilaku kurang sopan hal ini berkaitan erat dengan ketidakpahaman terhadap hak asasi manusia dari rasa aman, pada saat guru mengajar kadang ada siswa yang kurang menghormati guru atau kurang memperhatikan pada saat proses pembelajaran berlangsung bahkan membuat

gaduh suasana kelas sehingga mengganggu bagi temanya yang lain, ada siswa yang kurang memahami dan menghargai adanya pendapat yang berbeda. Di bawah ini disajikan beberapa contoh tindakan atau perilaku ketidakpahaman terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Contoh bentuk Prilaku Ketidakpahaman Siswa terhadap HAM di SMA Negeri I Bandar Sribawono

No.	Masalah yang sering terjadi tentang penghargaan HAM	Bentuk Ketidakpahaman/ Kurangnya Penghargaan HAM dan Kaitannya Pada Materi PPKn
1	Pada saat diskusi ada beberapa siswa kurang menghargai pendapat teman, kelompok dan melarang temannya yang lain menyatakan pendapatnya	HAM mengeluarkan pendapat/ politik
2	Ada beberapa siswa mengganggu siswi-siswi/ kurang berperilaku sopan	HAM merasa aman
3	Ada beberapa siswa mengolok-olok teman se kelas sehingga menyebabkan perkelahian	HAM merasa aman
4	Ada beberapa siswa kurang memperdulikan pelajaran dan penjelasan guru pada saat jam belajar di kelas, sehingga mengganggu teman yang lain.	HAM pendidikan dan pengajaran
5	Siswa kurang menghargai HAM orang lain/ kurang menghargai perbedaan yang ada	HAM pendidikan dan pengajaran

Sumber : Buku Catatan Guru Bimbingan Konseling Tahun 2014

Berdasarkan penyajian tabel di atas mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, terutama pada nilai-nilai yang berkaitan dengan materi HAM belum diaplikasikan dengan baik di sekolah tersebut. Ketidakberhasilan pengaplikasian nilai-nilai tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain media pembelajaran, kondisi siswa, dan metode atau tehnik guru

dalam menyampaikann materi. Dalam hal ini metode pembelajaran memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran PPKn. Dengan metode yang tepat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih menghargai sesama dalam pergaulan kehidupan sehari-hari baik dilingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat., akan tetapi semua itu memerlukan sebuah proses yang tidak mudah dan cepat, karena melihat keterbatasan yang dimiliki oleh setiap individu dan sarana dalam proses menumbuhkan kesadaran tentang hak asasi manusia pada peserta didik. Berikut ini disajikan data harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Harapan Mata Pelajaran PPKn dan Kenyataan di Lapangan Tentang Menumbuhkan Kesadaran HAM di SMA Negeri I Bandar Sribawono

No.	Harapan Proses Pembelajaran PPKn	Kenyataan Proses Pembelajaran PPKn
1.	Proses pembelajaran Pendidikan PPKn berpusat pada siswa.	Proses pembelajaan Pendidikan PPKn berpusat pada guru.
2	Proses pembelajaran Pendidikan PPKn menarik dan disenangi oleh siswa.	Proses pembelajaran Pendidikan PPKn monoton
3	Proses pembelajaran Pendidikan PPKn tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja, melainkan bisa dilaksanakan di luar kelas	Proses pembelajaran PPKn masih terpaku dilaksanakan dan berlangsung di dalam kelas atau ruangan.
4	Proses penilaian harus melingkupi 3 aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor.	Proses penilaian hanya menekankan pada saatu aspek saja yaitu aspek kognitif.
5	Materi Pendidikan PPKn di sajikan dengan menarik, dapat	Materi Pendidikan PPKn masih mengandalkan buku paket yang

	menampilkan berupa film atau video pendek, dan ditunjang dengan sarana yang memadai	dimiliki oleh peserta didik.
--	---	------------------------------

Sumber: Observasi

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa guru perlu menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman nilai dan sikap peserta didik. Metode yang mampu membina dan mempribadikan nilai dan moral, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata yaitu metode pembelajaran nilai (*value clarification method*). Penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana penerapan model pembelajaran *VCT* untuk menumbuhkan kesadaran terhadap penghargaan hak asasi manusia. *VCT*, merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali/ mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena itu, pada prosesnya *VCT* berfungsi untuk: *a*) mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai; *b*) membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik yang positif maupun yang negatif untuk kemudian dibina kearah peningkatan atau pembetulannya; *c*) menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya.

Djahiri (2003: 116) menyatakan bahwa *VCT* dimaksudkan untuk “melatih dan membina siswa tentang bagaimana cara menilai, mengambil keputusan terhadap suatu nilai umum untuk kemudian dilaksanakannya sebagai warga masyarakat”. Teknik mengklarifikasi nilai (*value clarification technique*) atau

sering disingkat VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran VCT, sub fokus penelitian:

1. Perencanaan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan model model pembelajaran VCT.
2. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran VCT
3. Kesadaran hak asasi manusia melalui model pembelajaran *Value VCT*
4. Efektivitas model pembelajaran VCT menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini secara umum dirumuskan bagaimanakah penerapan model pembelajaran *value clarification technique* untuk menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia pada mata pelajaran Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Bandar Sribawono Tahun 2014. dan secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran *VCT*.

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran *VCT* ?
3. Bagaimana kesadaran hak asasi manusia siswa dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran *VCT*.
4. Bagaimana efektivitas model pembelajaran *VCT*. Dalam menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia siswa.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan model pembelajaran *VCT* untuk menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Bandar Sribawono Tahun 2014. sedangkan secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Perencanaan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran *VCT*.
2. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran *VCT* ?
3. Kesadaran hak asasi manusia siswa dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran *VCT*
4. Efektivitas model pembelajaran *VCT*. Dalam menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia siswa.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji Instrumen hak azazi manusia. serta memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship tranmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi guru sebagai suplemen ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan pada materi penegakan Hak Asasi Manusia dan Implikasinya.
- 2) Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk dapat merubah sikap siswa dalam hubungan sosial.
- 3) Bagi siswa meningkatkan kemampuan memahami dan menjelaskan konsep dan nilai dalam materi Kewarganegaraan (*ranah kognitif*),

meningkatkan kecerdasan emosional siswa (*ranah afektif*), meningkatkan keterampilan berwarganegara (*ranah psikomotorik*).

F. Ruang Lingkup

1). Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Subyek

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Bandar Sribawono tahun pelajaran 2014/ 2015.

b. Ruang Lingkup Obyek

Objek penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran *VCT* dan kesadaran hak asasi manusia.

c. Ruang lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bandar Sribawono Kabupaten Lampung timur.

d. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini.

2) Ruang Lingkup Ilmu

Pendidikan IPS (*Social Studies*) menurut (Somantri dalam Sapriya 2002: 92), ” Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan”.

Menurut Nu'man Somantri (2001: 92). “PIPS adalah suatu *synthetic discipline* yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Makna *synthetic discipline*, bahwa PIPS bukan sekedar mensistesisikan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan, yaitu; Sebagai pendidikan kewarganegaraan, sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, dan sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif.

Tujuan pendidikan IPS secara umum adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik, dengan berbagai karakter yang berdimensi spiritual, personal, sosial, dan intelektual. PIPS menurut NCCS mempunyai tujuan informasi dan pengetahuan (*knowledge and information*), nilai dan tingkah laku (*attitude and values*), dan tujuan ketrampilan (*skill*): sosial, bekerja dan belajar, kerja kelompok, dan ketrampilan intelektual (Jarolimek dkk, 1993: 5-8).

Selain itu kaitan IPS dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, menurut Sapriya (2011:13-14) tradisi *Social Studies* yang semula tiga, yaitu: (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (*Social Studies as*

citizenship transmission), (2) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (*Social Studies as social sciences*), (3) IPS sebagai penelitian mendalam (*Social Studies as reflective inquiry*), kini telah berkembang menjadi lima tradisi dengan tambahan (4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial (*Social Studies as social criticism*), (5) IPS sebagai pengembangan pribadi individu (*Social Studies as personal development of the individual*). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan subsistem (bagian) pendidikan IPS yang dapat dikaji melalui konsep IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (*Social Studies as citizenship transmission*).